

ANALISA RESEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEMBERITAAN PROGRAM DERADIKALISASI TERRORISME DALAM TAYANGAN OPSI DI METROTV

Raden Bagus Yuniadji dan Afdal Makkuraga

Universitas Mercu Buana
afdalmakkuraga@gmail.com

Abstrak. Dalam kajian kritis tentang analisis resepsi ASN terhadap informasi yang disampaikan melalui tayangan OPSI di MetroTV, peneliti bermaksud melihat kondisi tersembunyi dalam diri para ASN yang menjadi subyek terkait dengan resepsi mereka terhadap program deradikalisasi yang ditayangkan. Peneliti mencoba mendalami bagaimana para subyek meresepsi informasi tersebut dengan menggali nilai, pengetahuan, dan pengalaman terkait hal-hal konseptual yang berhubungan dengan deradikalisasi terorisme. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis resepsi Stuart Hall. Hasil menunjukkan bahwa pemaknaan para informan tentang Program Deradikalisasi Menteri Jokowi memiliki beberapa posisi penerimaan. Penerimaan seorang informan terhadap satu *preferred text* tidak selalu linier dengan pemaknaannya atas *preferred text* yang lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh informan setuju bahwa dalam skala tertentu dan lapisan masyarakat tertentu, intoleransi terhadap keberagaman keyakinan memang tampak lebih menonjol pada beberapa peristiwa politik di tanah air.

Kata kunci: ASN, deradikalisasi, analisis resepsi

Abstract. In a critical study of the ASN acceptance analysis of the information conveyed through the OPSI program broadcasted on MetroTV, the researcher intends to see the hidden conditions in the ASNs who are the subjects related to their acceptance of the broadcasted deradicalization program. The researcher tries to explore how the subjects perceive this information by exploring values, knowledge, and experiences related to conceptual issues related to the deradicalization of terrorism. This study utilizes a critical paradigm with a qualitative approach using Stuart Hall's acceptance analysis. The results show that the understanding the informants possess on Jokowi's Deradicalization Program has several positions of acceptance. An informant's acceptance on one preferred text is not always linear with its interpretation of another preferred text. The results also show that all informants are in agreement that on a certain scale and a certain level of society, intolerance against the diversity of believes does appear to be more prominent in several political events in the country.

Keyword: State Civil Servant (ASN), deradicalication, acceptance analysis

PENDAHULUAN

Paham radikalisme terorisme telah merambah hampir kesemua lapisan masyarakat. Bahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi benteng bagi negara dan bangsa tak luput dari pengaruh paham ini. Hasil survei lembaga penelitian Alvira dikutip oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mayjen (Purn) Soedarmo menyebut 19,4 pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Indikasi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, sebab suatu pemahaman biasanya dipengaruhi oleh interaksi dengan pihak lain yang cukup intensif bukan satu atau dua kali.

Cepatnya penyebaran pengaruh radikal terorisme tidak lepas dari kemajuan teknologi, dimana seseorang dengan mudahnya paham dapat mengakses informasi dari berbagai sumber. Oleh karenanya tak heran tiap tahun jumlah ASN yang terpapar paham ini terus meningkat karena mereka secara tidak sadar sudah terbawa menuju arah gerakan radikal terorisme. Ini menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, sebagaimana disebutkan Rizal Sukma (2004), *Radicalism is only one step short of terrorism*. Paham keagamaan radikal seperti menjadi legitimasi yang menghalalkan tindakan kekerasan dan destruktif para teroris.. Pendapat ini senada dengan Sedgwick (2007), bahwa ideologi radikal tidak dapat disangkal lagi merupakan unsur penting dalam menghasilkan terorisme.

Indonesia salah satu di Asia Tenggara yang menjadi arena pertarungan terorisme. Ancaman ini meningkat secara signifikan ketika Indonesia memasuki periode transisi dari Orde Baru ke Era Reformasi, terutama awal tahun 2000-an. (Yunanto, 2017). Dikutip dari situs media daring *detiknews* dengan judul *Data Ledakan Bom di Indonesia 2000-2009* menampilkan serangkaian peristiwa terror. Peristiwa pengeboman di Kedutaan Besar Filipina di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2000 yang menewaskan 2 orang dan menyebabkan 21 orang lainnya mengalami luka-luka.

Fenomena aksi terorisme yang semakin marak terjadi membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang bersifat penanggulangan sampai dengan pemberantasan terorisme. Di masa pemerintahan Orde Lama penanganan terorisme menggunakan pendekatan keamanan dan kemiliteran dengan mengenakan pasal *subversive* terhadap para pelakunya. Pada masa Orde Baru, kekuatan militer masih menjadi ujung tombak dalam bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Pendekatan sekuriti dalam upaya penanggulangan terorisme ini mengutamakan kemampuan intelijen sebagai ujung tombak (Yunanto, dkk, 2014). Di era reformasi, kebijakan penanganan terorisme menekankan pada penegakan hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Amanat UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu mendorong perubahan strategi dan aksi pemberantasan terorisme lebih memperhatikan aspek *human rights* dengan pendekatan *soft power*. Salah satu yang umum dikenal adalah strategi deradikalisasi terhadap pelaku terorisme dan keluarganya. Secara lebih luas, menurut Golose (2009 ; 63), deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Amirsyah (2012 : 35-36) menghubungkan paham keberagaman yang radikal sebagai sebagai dasar deradikalisasi. Menurut Amirsyah, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif. Deradikalisasi, menurut Rabasa et al. (2010, p. Xiii) dalam Windisch, et.al didefinisikan sebagai "proses mengubah sistem kepercayaan individu, menolak ideologi ekstremis, dan merangkul nilai-nilai arus utama". Deradikalisasi menyiratkan individu telah menolak sistem kepercayaan ideologis, dan dengan demikian, tidak lagi menganut ideologi yang menjadi ciri kelompok tertentu.

Dalam kajian kritis tentang analisis resepsi ASN terhadap informasi yang disampaikan melalui tayangan OPSI di MetroTV, peneliti bermaksud melihat kondisi tersembunyi dalam diri para ASN yang menjadi subyek terkait dengan resepsi mereka terhadap program deradikalisasi yang ditayangkan. Peneliti mencoba mendalami bagaimana para subyek meresepsi informasi tersebut dengan menggali nilai, pengetahuan, dan pengalaman terkait hal-hal konseptual yang berhubungan dengan deradikalisasi terorisme. Konsep-konsep terkait itu diantaranya adalah tentang terorisme, radikalisme, kekerasan, ideologi dan hal-hal terkait lainnya yang mungkin muncul dalam proses mengumpulkan data.

Metro TV sebagai salah satu institusi media massa, khususnya melalui program tayangan OPSI, memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan program deradikalisasi yang digaungkan oleh pemerintah secara luas. Dalam penyebaran informasi tersebut, MetroTV tidak

lepas dari proses konstruksi pesan sebagaimana layaknya kerja teknis produksi berita media. Identifikasi masalah dalam penelitian ini pada adalah pada penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pemberitaan Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme di Metro TV. Tayangan informasi media (dalam bentuk teks atau gambar) merupakan stimuli yang mengundang respon tertentu dalam diri audiens. Salah satu penelitian dimana audiens menerima stimuli melalui media dilakukan oleh Rauch (2018) yang meneliti penerimaan audiens diantara pengaruh prasangka awal yang dimiliki (*preconceptions*) dengan tayangan film bertema Holocaust. Terlepas dari pentingnya gagasan dan pemahaman yang terbentuk sebelumnya, teks dan tayangan film tetap penting untuk penerimaan film individu. Adegan film lebih mungkin diingat jika menyebabkan respons emosional dalam diri audiens terkait dengan ingatan dan pengalaman.

Sementara dalam praktek industry media, Mubarak & Wulandari (2018) menyebut bahwa konten media merefleksikan pertarungan ideology, kepentingan ekonomi, kepentingan social, rutinitas media dan kemampuan kinerja dari awak media. Ghazaly (2018) bahkan secara lebih khusus menyebut media sebagai institusi bisnis dimana tentunya sumber penghidupan utama media adalah dari pemilik modal (*owner*), ditambah sumber pendapatan lain yang didominasi oleh iklan. Akibatnya, wajah media seringkali menampilkan kepentingan afiliasi politik dan ideology pemiliknya, yang tampak melalui proses konstruksi teks dalam pemberitaan oleh media.

Dominasi kuasa pemilik media / *owner* melalui struktur organisasi media, dan dalam tataran teknis tampak dalam rapat-rapat redaksi. Dalam operasional media bahkan pemimpin redaksi memiliki apa yang disebut hak veto, yaitu hak untuk mengganti *headline* yang sudah ditentukan dalam rapat. Ini menegaskan bahwa struktur organisasi media merupakan upaya memperjuangkan ideology dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kepatuhan sekelompok elit pengelola media (pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi, redaktur, dan asisten redaktur) terhadap dominasi tersebut menunjukkan adanya hegemoni pemilik dalam institusi media. Situasi ini menurut pendapat McNair (2015) merupakan refleksi kritik dari Sosialis dan Marxis yang berargumen bahwa wilayah kekuasaan riil dalam masyarakat kapitalis bersembunyi dibalik prosedur politik formal; di ruang rapat perusahaan besar; di posisi tinggi kepegawaian dan aparaturnegara.

Beberapa penelitian komunikasi massa terdahulu memberi kekuatan besar terhadap komunikasi massa untuk mempengaruhi audiensnya. Ini tampak dalam konseptualisasi teori peluru atau teori jarum suntik. Dalam penelitian selanjutnya, menurut Severin dan Tankard (2005), tampak melalui hipotesis penentuan agenda (*agenda setting*) atau *cultivation theory*, meskipun pengaruhnya tidak sebesar teori peluru. Secara rutin dan sistematis, dapur redaksi melakukan produksi berita yang 'dicurigai' tidak bebas dari kekuatan / kekuasaan tertentu. Pemilik media adalah pihak utama yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan representasi dalam suatu berita.

Analisis resepsi dalam penelitian ini memfokuskan pada pertemuan media dan audiens. Dalam analisis ini, audiens dilihat sebagai subyek yang secara aktif memproduksi makna. Dengan teori khalayak aktif dan analisis resepsi audiens, khususnya ASN di Kementerian XYZ sebagai subyek penelitian, Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerimaan subyek terhadap konstruksi media dalam pemberitaan tentang program deradikalisasi. Peneliti ingin mengidentifikasi apakah program deradikalisasi sebagai wacana dominan pemerintah melalui OPSI MetroTV merupakan reproduksi ideology yang memiliki kepentingan tertentu dalam penerimaan audiens. Dengan teori khalayak aktif dan analisis resepsi audiens, khususnya ASN di Kementerian XYZ sebagai subyek penelitian, Peneliti ingin mengetahui bagaimana posisi audiens di Kementerian XYZ dalam penerimaan terhadap pemberitaan tentang program deradikalisasi terorisme di Acara Opsi yang ditayangkan di MetroTV? Sehingga penelitian ini diberi judul **"Analisa Resepsi Aparatur Sipil Negara Tentang Pemberitaan Program Deradikalisasi Terrorisme Di MetroTV"**

KAJIAN TEORI

Penelitian analisis resepsi selalu berawal dari asumsi dasar bahwa audiens tidak menerima informasi dalam segala bentuknya, dengan kepala kosong. Penelitian tentang teks media sebagaimana dilakukan oleh Sely Tan 2018; Uswatun Nisa. 2017; Muhaemin, 2019; Yumarnanto et. al, 2020, menunjukkan bahwa penerimaan audiens tersebar dalam tiga posisi berbeda. Nisa, 2017 menunjukkan penerimaan audiens terhadap teks media dipengaruhi juga oleh latar belakang primordial, yaitu masyarakat Aceh dengan segala nilai social dan budayanya. Imran, 2012 meneliti the audience theory pada framing koran Kompas dalam membahas dan mengemas wacana keagamaan intoleransi dan religiusitas di Indonesia dengan metode analisis framing Robert N. Entman yang memfokuskan kajian pada keunggulan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretasi media dalam menafsirkan objek yang menjadi wacana.

Hal yang sama terjadi dalam penerimaan audiens terhadap tayangan berita televisi atau film. Audiens membawa serta prasangka (preconceptions) unik mereka sendiri yang terbentuk melalui pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam ingatan. Sebagaimana penelitian Stefanie Rauch. 2018 yang mencoba memahami Holocaust melalui tayangan film; Briandana, et.al 2018 mengenai penerimaan audiens Indonesia terhadap K-Drama.

Perspektif primordial dengan analisis resepsi juga digunakan dalam penelitian oleh Afdal dan Simorangkir, 2020, untuk mengetahui posisi penerimaan masyarakat Jakarta yang terdiri dari beragam suku bangsa, terhadap film A Man Called Ahok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara etnis Tionghoa dengan etnis Jawa, Sunda dan Batak etnisitas dalam hal memaknai film "A Man Called Ahok". Penerimaan dalam tipe ini mengandung unsur adaptif dan penentang, artinya pesan dimaknai dalam negosiasi. Dalam meneliti khalayak aktual memerlukan lebih dari sekedar analisis tekstual belaka, tetapi perlu juga memahami kompleksitas proses penerimaan dan hubungan antara sejarah, film dan memori.

Khalayak Aktif

Istilah *active audience* (penonton/khalayak aktif), dicetuskan oleh psikolog Raymond Bauer untuk memperhalus penyebutan kepada khalayak yang memiliki karakteristik "*imperviousness to influence*" dan "*obstinate audience*" (Biocca 1985). Tidak terpengaruh dan keras kepala, adalah karakteristik yang digambarkan Bauer untuk menunjukkan sikap khalayak aktif. Khalayak aktif secara ideal dianggap mandiri, rasional, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan bebas mengejar kehidupan, kebebasan, dan properti. Kebebasan dicapai dengan menyangkal efektivitas komunikasi massa dan budaya massa dan menggandakannya melalui proses regresi jumlah pilihan tak terbatas. Menurut Biocca, "individu" aktif adalah warga negara-konsumen modern yang berpatroli di pinggiran kesadarannya dengan konsumerisme yang waspada.

Di sisi lain, penelitian khalayak aktif dalam hubungan dengan efek yang ditimbulkan dari pesan komunikasi massa juga sejak lama muncul. Penelitian Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Gaudet Hazel berjudul *The People Choice* (1944) dan *Voting* (Barelson, Lazarsfeld, dan McPhee, 1954) sebagaimana dikutip Severin dan Tankard (2005:15), memberikan pandangan baru bahwa media massa tidak memberi kekuatan cukup besar terhadap pesan komunikasi massa. Pandangan ini seringkali disebut sebagai model pengaruh-terbatas (*limited-effect model*), sebagaimana disampaikan dalam buku Joseph Klapper, *The Effect of Mass Communication* (1960). Audiens dianggap memiliki daya untuk menolak secara wajar terhadap pesan-pesan komunikasi massa.

Kajian tentang khalayak aktif yang muncul kemudian dikemukakan oleh Baran dan

Davis (2012:285), yang berpendapat bahwa teori khalayak aktif bukanlah tentang usaha untuk memahami apa yang dilakukan oleh media kepada khalayak, melainkan sebaliknya memusatkan perhatian untuk meneliti apa yang dilakukan khalayak tentang media. Khalayak dalam persepektif ini memiliki kuasa ketika mengkonsumsi media, meskipun masing-masing orang melakukan dengan cara berbeda dalam merekonstruksi makna dari sebuah pemberitaan.

Analisis Resepsi Khalayak

Menurut Croteau dan Hoynes (2003), konsep khalayak aktif adalah kritik terhadap kekuatan media dan kepercayaan kepada kekuatan individu/audiens. Khalayak bertindak sebagai penentu yang mampu menafsirkan pesan dengan mandiri dan bebas bertindak atau berperilaku berdasarkan pemaknaan dari teks media. Riset resepsi khalayak berfokus pada cara anggota audiens memahami makna yang dimediasi. Ini merujuk pendapat McQuail (1997:19) yang menyebutkan bahwa focus pandangan analisis resepsi terkait erat dengan penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial budaya dan sebagai proses dari pemberian makna terhadap seluruh pengalaman dan produksi kultural. Media sebagai saluran pesan menyampaikan berbagai kombinasi simbolik yang memiliki arti atau kegunaan.

Media dalam pandangan Ruben dan Stewart (2017:207) membantu produksi, distribusi, reproduksi, dan/atau amplifikasi juga berperan penting dalam penerimaan sedemikian rupa sehingga pesan dapat diakses.

Rekonseptualisasi fundamental teori resepsi khalayak dalam penelitian komunikasi massa diangkat oleh sarjana studi budaya Inggris Stuart Hall (1974). Hall berfokus pada komplementaritas pembuatan makna dari momen-momen *encoding* dan *decoding* produksi media dan gagasan bahwa tidak ada kesesuaian alami antara dua momen ini. Hall seperti dikutip Baran (2008: 269-279), memfokuskan tentang bagaimana individu pelaku komunikasi massa melakukan *decoding*, yaitu proses pemaknaan terhadap pesan media. Kritik Hall (dalam Carey 1989:15) adalah terhadap alur komunikasi pada masa itu yang secara dominan dipandang bersifat linier yaitu *sender-message-receiver*. Hall memandang proses komunikasi lebih kompleks daripada model transmisi Shannon dan Weaver.

Dalam *Encoding/Decoding* (1980) Hall, sebagaimana dikutip During (1993), menawarkan alur baru dalam proses komunikasi yang disebutnya *circulation circuit*. Alur ini memiliki 4 tahapan komunikasi yaitu: 1. *Production* 2. *Circulation* 3. *Use (Consumption / Understanding)* 4. *Reproduction*. Hall juga menginspirasi gagasan tentang *the text's preferred meaning* dan tiga kemungkinan posisi audiens dalam melakukan decoding pesan media sebagai posisi dasar dalam mengaktualisasikan makna yang disukai ini. *The text's preferred meaning* atau dikenal juga dengan istilah *preferred reading* adalah makna yang secara dominan ditawarkan dalam teks oleh pembuat pesan. Namun dalam kajian khalayak aktif, *preferred reading* sangat terbuka untuk diterima dan memiliki pemaknaan berbeda dengan keinginan pembuat pesan. Dengan kata lain, menurut Littlejohn dan Foss (2009:66), penonton memiliki kebebasan relatif untuk menafsirkan makna yang disandikan yang ditawarkan kepada mereka dalam teks media. Littlejohn dan Foss memahami pemaknaan teks media dianggap sebagai *polysemous* (yaitu, membawa banyak makna potensial).

Hall dalam (Avriyanty, 2012: 13) membagi tiga posisi audiens dalam melakukan decoding terhadap pesan media: 1) *Dominant-hegemonic position* atau Posisi Hegemoni Dominan. Pada posisi penerimaan ini, baik media dan khalayak sama-sama menggunakan budaya dominan yang berlaku dalam masyarakat Dengan kata lain, audiens sejalan dengan kode dominan yang dari awal berusaha dibangun oleh pengirim pesan. 2) *Negotiated position* atau Posisi Negosiasi. Pada posisi ini penerimaan khalayak memiliki batasan-batasan melalui proses seleksi atas cocok atau tidaknya suatu ideologi diadaptasikan dalam konteks dan ruang lingkup terbatas (*local*). 3) *Oppositional position* atau Posisi Oposisi. Posisi ini menunjukkan sikap kritis khalayak untuk mengubah pesan atau kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode alternatif.

Teori Kritis / *Critical Theory*

Teori kritis menurut Littlejohn & Foss (2009) harus dipahami sebagai serangkaian kerangka teoritis yang longgar dimana semuanya memiliki tujuan mengkritik dominasi dengan tujuan akhir perubahan sosial. Benang merah dalam penelitian teori kritis, menurut Littlejohn & Foss, adalah dalam cara memeriksa kondisi sosial untuk mengenali struktur produktif yang tersembunyi dari marginalisasi. Ahli teori kritis memahami bahwa struktur seperti bahasa, institusi sosial, dan pemerintah menghasilkan sistem makna dan pengetahuan tentang kelompok tertentu. Hal ini termasuk praktek produksi informasi di media massa yang tidak terbebas dari kekuatan yang mengontrol ideologi media. Dalam kajian kritis, menurut Ghazaly (2018), pemilik media dianggap sebagai representasi kelompok kapitalis yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, ideology dan idealisme yang sangat dominan dalam usaha pemberitaan.

Manusia adalah bagian dari sistem sosial, di mana mereka berkomunikasi, yaitu mereka bertukar pengetahuan dan dengan demikian dapat menciptakan pengetahuan individu baru dan mereproduksi pengetahuan individu yang ada. Pengetahuan adalah salah satu bentuk kekuatan. Oleh karena itu perjuangan emansipatoris memiliki kekuatan untuk menciptakan alternatif, pengetahuan emansipatoris itu mempertanyakan pengetahuan dominatif. Oleh karena itu ditegaskan oleh Griffin (2003), para ahli teori kritis, khususnya, bersikeras bahwa para ilmuwan tidak dapat lagi terpisah secara etis dari orang-orang yang mereka pelajari atau dari implikasi politik dan ekonomi dari pekerjaan mereka.

Komunikasi Politik

McNair (2011) memberikan semacam pengakuan tentang bagaimana sulitnya mendefinisikan secara tepat konsep komunikasi politik, lantaran komponen dari frase itu sendiri terbuka bagi bermacam definisi, yang bisa lebih atau kurang luas. Sebagian ilmuwan memberikan perhatian pada alokasi sumberdaya, kewenangan, dan sanksi. (Denton dan Woodward dalam McNair, 2011:3). Sebagian lagi memberi penegasan tentang konflik (Nimmo, 2000:76). Sedangkan yang lain memperluas lingkup kajian bukan hanya sebatas retorika namun juga mencakup tindak komunikasi simbolik dan isyarat paralinguistik seperti bahasa tubuh, dan tindakan politik seperti boikot dan protes (Graber dalam McNair, 2011).

Dalam kepentingan kajian ini, dimana peneliti memberi perhatian tentang kebijakan deradikalisasi pemerintah dalam konstruksi media massa, maka penulis mengadopsi konsep komunikasi politik yang berhubungan dengan penyebaran informasi. Untuk itu peneliti mengadopsi konsep komunikasi Michael Rush dan Philip Althoff (1997) dan Cangara (2009). Rush dan Althoff (1997:22-24) berpendapat tentang komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya. Informasi tersebut dipertukarkan di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan dalam sistem-sistem sosial dan sistem-sistem politik secara berkesinambungan dalam pola tertentu. Selanjutnya, Cangara (2009:35) mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain. Cangara sependapat dengan Nimmo yang secara sederhana menyebut komunikasi politik sebagai 'pesan bertujuan. Menurut Cangara, komunikasi politik memiliki tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Dengan demikian, konseptualisasi komunikasi politik dapat dipahami sebagai upaya penyebarluasan pesan dari komunikator politik untuk membuka wawasan, mempengaruhi cara berpikir dan opini publik, mempengaruhi sikap dan bertingkah laku dengan tujuan menjaga kepentingan politiknya.

Aparatur Sipil Negara

Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri (W.J.S. Poerwadarminta, 1993:165). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Fungsi utama ASN (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) adalah pelayanan publik, pelaksana kebijakan pemerintah dan alat pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, posisi ASN dalam penelitian ini, berkaitan dengan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sepatutnya mendukung kebijakan Pemerintah terkait deradikalisasi terorisme.

Deradikalisasi Terorisme

Deradikalisasi berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip). Kata radikal semula memiliki makna yang netral, bahkan cenderung positif oleh karena menunjukkan keteguhan dan konsistensi sikap. Namun, seiring konstruksi pesan melalui media massa, kata ini lalu diasosiasikan dengan sikap intoleran. Sedangkan deradikalisasi menurut Bakti (2016:142), adalah upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham radikal teroris.

Hal ini tampak dalam penggunaan istilah tersebut oleh Rizal Sukma (2004), mengistilahkan dengan "*Radicalism is only one step short of terrorism.*" Pendapat tersebut tampaknya didasari pada tindak kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan kengerian ketika pada teroris melegitimasi tindakannya dengan paham keagamaan radikal yang mereka anut. Pendapat ini senada dengan Sedgwick (2007), bahwa ideologi radikal tidak dapat disangkal lagi merupakan unsur penting dalam menghasilkan terorisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang secara teoritis dikembangkan oleh para ahli Mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno dan Herbert Marcuse. Paradigma kritis menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis realitas sosial yang kompleks dengan mempersoalkan ketimpangan relasi sosial dalam masyarakat. Metode Stuart Hall tentang analisis resepsi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pertemuan media dan audiens, dimana audiens dipandang sebagai subyek yang secara aktif memproduksi makna (*producer of meaning*), bukan hanya menjadi konsumen dari isi media. Penelitian khalayak menggunakan metode analisis resepsi Stuart Hall tentang *the text's preferred meaning* dan tiga kemungkinan posisi audiens yang terdiri dari : *Dominant-hegemonic position* atau Posisi Hegemoni Dominan, *Negotiated position* atau Posisi Negosiasi, dan *Oppositional position* atau Posisi Oposisi.

Metode analisis resepsi ini termasuk dalam pendekatan penelitian kualitatif dimana oleh Denzin & Lincoln (2009:2) disebutkan bahwa penelitian kualitatif memiliki fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subyek kajiannya. Keragaman metodologi kualitatif menurut Sugiyono (2008:8). mengharuskan seorang Peneliti kualitatif memiliki kemampuan lengkap tentang teori serta wawasan yang luas sehingga dapat bertanya lebih dalam menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Informasi dan Penilaian atas Independensi Media

Penerimaan informasi, menurut Ruben & Stewart (2017) merupakan proses aktif yang melibatkan pesan lingkungan ke dalam suatu bentuk yang dapat digunakan untuk memandu perilaku. Proses ini mengandung 3 unsur yaitu: seleksi, interpretasi dan retensi informasi Ruben & Stewart (2017:103). Seleksi berhubungan dengan membuat skala prioritas sumber informasi yang saling bersaing dan mengalokasikan perhatian kita terhadap semua itu sambil tetap melakukan pemantauan terhadap pesan lain dan bahkan sambil terlibat dengan sumber informasi lain (hal.108). Interpretasi adalah cara kita memaknai isyarat-isyarat dalam lingkungan (hal. 109). Sedangkan retensi memori berhubungan proses memunculkan informasi yang terikat di memori (hal. 111).

Proses penerimaan informasi dalam unsur seleksi tampak jelas dari cara para informan penelitian melakukan pemilihan skala prioritas sumber berita. Informan 1, Informan 4, dan Informan 5 memiliki preferensi terhadap berita politik dan memiliki kecenderungan mengonsumsi informasi – informasi politik yang diperolehnya dari stasiun televisi berita seperti TV One, MetroTV, CNN. Sedangkan informan lain yang memiliki preferensi terhadap informasi non politik, seperti hiburan, olahraga, dan musik lebih banyak mengakses informasi dari stasiun televisi lain.

Preferensi para informan terhadap informasi tertentu tampaknya memiliki keterkaitan dengan penilaian para informan terhadap independensi media. Para informan terbelah dalam sikap yang berbeda akan penilaian tentang independensi media. Independensi media dalam penelitian ini menjadi faktor penentu untuk melihat bagaimana proses penerimaan para informan terhadap teks.

Dalam wawancara dengan para informan penelitian ini, didapati bahwa informan yang memiliki preferensi terhadap informasi atau berita politik, hukum, dan kebijakan public memiliki pendapat bahwa media memiliki keberpihakan atau memiliki afiliasi pada kubu politik tertentu. Dengan kata lain, Informan tersebut menyatakan kecurigaannya bahwa media massa tidak independen melainkan terikat pada kepentingan tertentu. Penilaian ini didasarkan unsur retensi memori Ruben & Stewart (2017:113) tentang apa yang disebut memori semantic. Memori semantic adalah pengetahuan umum kita tentang orang, tempat, dan hal-hal lain di dunia ini.

Penilaian para informan bahwa media tidak independent, atau sedikit independent dan lebih banyak tidak independent terutama saat kontestasi politik tanah air, didasarkan pada pengetahuan umum para informan tentang kepemilikan media. Para informan mengetahui bahwa para pemilik media besar adalah para petinggi partai politik. Ditambah lagi kepemilikan tersebut adalah dalam bentuk korporasi media yang terkonsentrasi dan memiliki karakter konvergensi. Doyle (2002) menyebutkan, bahaya utama yang dirasakan adalah bahwa konsentrasi kepemilikan media yang berlebihan dapat menyebabkan over-representasi dari sudut pandang atau nilai politik tertentu atau bentuk tertentu output budaya (yaitu yang disukai oleh pemilik media dominan, apakah atas dasar komersial atau ideologis) dengan mengorbankan orang lain.

Pendapat para informan tentang keberpihakan media, dapat kita rujuk pada perspektif teoritis Gans dan Gitlin (dalam Shoemaker & Reese, 1996) dalam melihat isi media. Menurut Gans dan Gitlin, isi media merupakan realitas tanpa distorsi atau realitas dengan hanya sedikit distorsi. Sosialisasi dan sikap pekerja media, menurut Gans dan Gitlin, berpengaruh terhadap isi media. Beberapa hal lain seperti rutinitas kerja, kekuatan institusi lain di luar media, dan posisi ideologi serta tujuan mempertahankan status quo juga berpengaruh terhadap isi media. Dalam pandangan Penulis, para informan memiliki keyakinan bahwa, selain dipengaruhi kekuatan di luar media, isi media juga dipengaruhi posisi ideologi media yang berada pada satu kepentingan yang sama dengan ideologi dan keberpihakan politik pemilik media.

Para pemilik media ini berada di kubu pendukung pemerintah dan di kubu lawan politik. Dengan demikian, menurut para informan, konstruksi berita memiliki intensi tertentu yang menguntungkan bagi kelompoknya. Doyle (2002:15) menyebutkan bahwa banyak sekali penulis yang memusatkan perhatian pada potensi kerugian yang mungkin timbul dari kepemilikan media yang terkonsentrasi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan politik oleh pemilik media.

Pemetaan Penerimaan Informan terhadap *Preferred Text*

Sejumlah *preferred text* dalam tayangan OPSI MetroTV yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pertarungan ideologi. Syuderajat (2018) dalam Muhaemin dan Sanusi (2019) menyebutkan bahwa ideologi media yang bersangkutan berpengaruh dalam mereproduksi peristiwa menjadi sebuah berita. Ideologi tersebut tampak dalam produksi teks ujaran, angle pemberitaan serta ilustrasi gambar berupa foto atau grafik yang ditampilkan oleh media. Sebagaimana Morley (1992) menemukan bingkai ideologi dalam sejumlah penelitian oleh Hall et al. (1981) yang diturunkan dari karya Gramsci dan Althusser.

Pertarungan ideologi terjadi dalam konteks dinamika politik negara skala makro Indonesia sebagai sebuah bangsa, mau pun skala mikro menyangkut konflik kepentingan aktor politik (individu dan kelompok) serta afiliasi politiknya. Dalam kepentingan politik negara, ideologi yang dimaksud adalah Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menghargai keragaman, menjunjung toleransi, memayungi serta menyatukan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); berhadapan dengan ideologi yang dianggap berbeda, intoleran, dan cenderung memaksakan kehendaknya sebagai kebenaran mutlak. Demikian cara media mengonstruksi pertarungan ideologi, dimana tampak dalam *preferred text* yang dianalisis.

Dalam konteks pertarungan ideologi kelompok, MetroTV sebagai penyelenggara acara OPSI dipandang memiliki kepentingan politik. McNair (2015) mendefinisikan pelaku politik sebagai individu yang berkeinginan, melalui sarana organisasi dan institusi, untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, MetroTV sebagai institusi media dapat dipandang sebagai representasi kepentingan pemilik media. Sebagaimana Sudibyo (2012) menyebut bahwa sebagian pemilik media sekaligus merupakan pemimpin partai politik atau dekat dengan jaringan politik tertentu. Menurutnya, titik inilah bertemunya gerak spesialisasi ekonomi dan spesialisasi politik terkait dengan posisi media. Pendapat ini juga berkaitan dengan tujuan media sebagai bagian komunikasi massa, dimana memiliki tujuan yang berfokus pada soal-soal implikasi komersial, politik, pendidikan dan termasuk menyangkut gossip (Cooley dalam Ali Imran, 2012).

Media massa dalam pandangan De Fleur & Rokeach (1982) merupakan sistem sosial yang beroperasi pada suatu totalitas sistem yang saling berketergantungan. Komponen-komponen ini terdiri dari: *audiences, research organizations, distributors, producers and their sponsors, advertising agencies* dan *subsystems of control* (De Fleur & Rokeach 1982, 173-175). Dalam penelitian ini, Audiences (khalayak) akan menjadi fokus utama analisis, secara khusus menyangkut penerimaan khalayak terhadap produksi teks media.

Pernyataan teks media sebagaimana tampak pada *preferred text* dalam tabel 4.1 (a, b, c, d, dan e) adalah wacana dominan sebagai hasil reproduksi ideologi media dalam kerangka relasi kuasa dengan kekuatan politik dimana media berafiliasi. Sebagaimana pendapat Mubarak & Wulandari (2018) bahwa isi media sarat dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya. Dalam relasi kuasa media dan kekuatan politik dominan, salah satu tujuannya adalah memelihara tatanan sosial atau hegemoni. Media massa, menurut Soalohon (2017) dapat menjadi alat untuk membangun sebuah opini publik dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan.

Menurut Ruben & Stewart (2017:103), penerimaan informasi adalah proses aktif yang memandu perilaku melalui tiga unsur yaitu seleksi, interpretasi, dan retensi, Unsur seleksi

bekerja layaknya penyaring dimana kita membuat skala prioritas sumber informasi yang bersaing mengalokasikan perhatian. Dengan demikian, penerimaan informasi selalu berkaitan dengan pemilihan informasi tertentu dan sekaligus pengabaian terhadap informasi-informasi lainnya.

Pendapat Ruben & Stewart tersebut mempertemukan konsep penerimaan khalayak dengan paradigma kritis yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Kritis dalam pandangan Hokheimer bertujuan memulihkan manusia sebagai subjek yang mengendalikan sendiri kenyataan sosialnya, (Hardiman, 1990:48-53 dalam Maryani, 2007:38). Proses seleksi yang diungkapkan Ruben & Stewart memperlihatkan apa yang disampaikan Hokheimer tentang manusia sebagai subyek yang mengendalikan kenyataan sosialnya.

Tabel 1. Pemetaan Preferred Text Media

	Preferred Text	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
a	Intoleransi semakin marak di Indonesia	■	■	■	■	■	■	■	■
b	Program deradikalisasi terorisme di Indonesia bersifat penting dan mendesak	■	■	■	■	■	■	■	■
c	Upaya memerangi radikal terorisme dengan memperbaiki kurikulum pelajaran pada tingkat paling bawah dan mensupervisi tenaga pengajar	■	■	■	■	■	■	■	■
d	Wabah radikalisme telah menjadi ancaman nyata bagi kedamaian dan keutuhan NKRI maka harus diberantas hingga ke akar-akarnya	■	■	■	■	■	■	■	■
e	Misi deradikalisasi rentan dimanfaatkan pemerintah untuk membungkam lawan politik	■	■	■	■	■	■	■	■

Keterangan:

■ Dominant-hegemonic ■ Negotiated position ■ Oppositional position

Fokus utama dari metode analisis resepsi adalah pemaknaan dan pemahaman individu yang mendalam atas pesan komunikasi massa yang disampaikan dalam teks media, dan bagaimana individu menginterpretasikan isi media (Baran, 2003 : 269-270). Posisi penerimaan audiens terhadap *preferred text* dalam tabel di atas (a, b, c, d, dan e) terbagi dalam tiga posisi penerimaan yaitu a. Posisi hegemonik-dominan (*dominant-hegemonic reading*); b. Posisi yang dinegosiasikan (*Negotiated reading*); c. Posisi oposisional (*Oppositional hegemonic reading*). Produksi teks media yang menyebut bahwa *Intoleransi semakin marak di Indonesia* terbagi dalam 3 posisi penerimaan. Meskipun ada dua informan dengan posisi penerimaan yang menyetujui konstruksi teks media, namun mayoritas informan berada pada posisi yang tidak sepenuhnya atau bahkan sama sekali bertolak belakang dengan konstruksi media. Mayoritas informan mengalami masih banyak kelompok dan komunitas masih menjaga dan menjunjung toleransi dalam bermasyarakat dan beragama. Para informan tersebut ingin menunjukkan bahwa peristiwa intoleransi meskipun ada, tetapi sifatnya terbatas pada wilayah-wilayah dan kasus-kasus tertentu. Pendapat para informan yang berbeda dengan konstruksi teks media tersebut menurut Ido Prijana Hadi (2008), menunjukkan individu yang aktif menginterpretasikan teks media melalui pemaknaan berdasarkan pengalaman sesuai apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari (*Verstehen* atau *understanding*).

Program deradikalisasi terorisme di Indonesia bersifat penting dan mendesak. Mayoritas informan menyetujui pernyataan ini, meskipun dua diantaranya mengajukan kondisi-kondisi tertentu yaitu, perlakuan yang adil terhadap semua kelompok agama yang terindikasi radikal dan batasan waktu. Dari delapan informan, hanya 1 informan yang memberikan pemaknaan yang sama sekali bertolak belakang dengan *preferred text* media (*lihat Tabel 4.1 butir b*). Salah satu unsur penting dalam penerimaan informasi menurut Ruben & Stewart (2017:109) adalah interpretasi; yang berhubungan dengan cara kita memaknai isyarat-

isyarat dalam lingkungan kita—apakah kita menganggapnya penting atau sepele, serius atau lucu, baru atau lama, bertentangan atau konsisten, lucu atau mengkhawatirkan Pernyataan informan yang bertolak belakang tentang pentingnya program deradikalisasi (penting tapi tidak mendesak), menunjukkan proses interpretasi yang dilakukan Informan tersebut menghasilkan pemaknaan atas teks tersebut sebagai sebagai suatu yang penting tetapi tidak mengkhawatirkan, dan oleh karenanya bukan merupakan sesuatu yang mendesak. Meskipun demikian, berdasarkan penerimaan mayoritas secara umum disimpulkan bahwa program deradikalisasi mendapat dukungan para informan.

Preferred text media tentang upaya memerangi radikal terorisme dengan memperbaiki kurikulum pelajaran pada tingkat paling bawah dan mensupervisi tenaga pengajar, mendapat beragam tanggapan dari para informan. Lima informan setuju dengan teks, dua informan menyatakan setuju tetapi dengan batasan tertentu yang bisa diadaptasi di tingkat lokal, satu informan bertolak belakang. Penerimaan teks tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, khususnya menyangkut pendidikan agama yang dilakukan oleh komunitas.

Media terintegrasi kedalam kehidupan sosial seseorang setiap harinya (Jensen, 2002 : 161-163). Produksi teks media dalam *preferred text* tersebut berada dalam konteks sosial dimana program deradikalisasi terkait erat dengan Pendidikan agama, kurikulum yang digunakan, dan tenaga pengajarnya. Konteks sosial ini juga terkait dengan pengalaman dan pemahaman informan dalam proses *decoding* teks media. Informan yang menolak pernyataan tersebut dan menganggapnya berlebihan berdasarkan pengalamannya dalam jenjang pendidikan dan komunitas keagamaan yang diikutinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam teks media, kata kunci yang dimaknai oleh Informan 1 adalah ‘memperbaiki kurikulum’ dan ‘mensupervisi pengajar’ merujuk pada pengalamannya, adalah berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring ‘supervisi’ berarti pengawasan utama; pengontrolan tertinggi; penyeliaan. Pengertian tersebut membawa kekhawatiran Informan pada campur tangan Negara yang terlalu jauh dalam kehidupan beragama.

Posisi penerimaan informan yang setuju dengan teks media, didasarkan pada pengalaman langsung maupun informasi dari luar dirinya, tentang ada bahan ajar atau kurikulum menyangkut mata pelajaran keagamaan yang tidak sesuai dengan usia peserta didik. Sedangkan posisi penerimaan yang dinegosiasikan didasarkan pada pertimbangan informan yang menguatkannya bahwa kurikulum atau bahan ajar justru menonjolkan simbol dan *stereotype* tertentu yang mengarah kepada kelompok agama tertentu. Hal ini bertujuan agar pemahaman anak terkait radikal terorisme tidak menjadi sempit hanya pada kelompok agama tertentu saja. Pertimbangan informan tersebut dalam kajian komunikasi massa Wendell Johnson (1946, hlm 270 dalam Severin & Tankard 2005, 113) menyebutkan tentang *Undue identification* (pengenalan tidak tepat); yaitu kegagalan melihat perbedaan antara anggota kategori atau kelompok yang berbeda dianggap sama, atau disamakan. Salah satunya adalah mengasosiasikan orang dengan pakaian menyimbolkan agama tertentu dianggap sebagai teroris.

Wabah radikalisme telah menjadi ancaman nyata bagi kedamaian dan keutuhan NKRI maka harus diberantas hingga ke akar-akarnya. *Preferred text* tersebut diterima secara positif oleh seluruh informan. Tujuh informan berada pada posisi penerimaan yang sesuai dengan pernyataan media. Sedangkan 1 informan menyetujui pernyataan tersebut tetapi dengan memberikan syarat tertentu yaitu menjunjung hukum dan hak asasi manusia. Penerimaan positif oleh para informan menunjukkan pengaruh media yang kuat atas informan. Para informan menyetujui pernyataan media yang memperlihatkan adanya radikalisme dalam masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Bertentangan bukti-bukti rendah karena beberapa peristiwa di tanah air menunjukkan keberadaan aktivitas yang dianggap radikal. Informan menerima dan berbagi nilai media tentang isu radikalisme. Hal ini memperkuat posisi media dalam mempengaruhi penerimaan informan atas teks tersebut.

Preferred text media yang terakhir menyebutkan bahwa misi deradikalisasi rentan

dimanfaatkan pemerintah untuk membungkam lawan politik. Terkait pernyataan tersebut, mengingat keberpihakan media yang menayangkan yaitu MetroTV, maka dalam pandangan Penulis, teks tersebut memiliki intensi sebaliknya. MetroTV memiliki hubungan erat dengan pusat kekuasaan. Agenda media, dalam hal ini tampak dalam bentuk produksi teks yang dihasilkan melalui mekanisme internal media seperti keputusan manajerial dan editorial; dan pengaruh eksternal non-media, seperti kelompok elit politik dan pemerintahan, perusahaan pengiklan, dan kelompok dominan berpengaruh.

Pemilik MetroTV sekaligus Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) IV dan HUT ke-6 NasDem dengan terbuka menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan suksesi kepemimpinan (*wartaekonomi.co.id*). Dampak dari pilihan politik tersebut, dikutip dari *cnnindonesia.com*, beberapa kader Partai Nasdem antara lain Johnny G. Plate, Syahrul Yasin Limpo, dan Siti Nurbaya Bakar mendapat jatah posisi Menteri dalam kabinet Kabinet Indonesia Maju 2019. Konstruksi teks media disusun untuk melihat posisi penerimaan teks oleh orang yang dicurigai memiliki kepentingan dan tujuan berlawanan atau maksud tersembunyi. Dalam hal ini, seringkali berhubungan dengan alokasi kekuasaan, melegitimasi jabatan, dan kontrol opini khalayak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada relasi kekuasaan yang setara antara kepentingan elit dengan media, yang dipandang oleh Littlejohn & Foss (2011), memiliki pengaruh dalam menentukan agenda masyarakat. Kedekatan hubungan kelas elit dengan media sangat mungkin mempengaruhi agenda media. Kelas elit sebagai pemilik ideologi dominan akan menjadikan media sebagai instrumen ideologi kelompoknya. Dalam reproduksi ideologi kelompok melalui MetroTV, didapati respon mayoritas informan yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap teks tersebut. Ini berarti para informan melihat kebijakan deradikalisasi bukan sebagai alat membungkam lawan politik.

Meskipun demikian, satu informan menyatakan setuju dengan teks media. Informan mencurigai ada agenda tersembunyi yang terkait dengan hubungan kekuasaan antara media dan kekuasaan. Kekuasaan media dalam menentukan agenda masyarakat bergantung pada hubungan mereka dengan pusat kekuasaan (Littlejohn & Foss, 2011 : 418). Kedekatan hubungan kelas elit dengan media sangat mungkin mempengaruhi agenda media. Kelas elit sebagai pemilik ideologi dominan akan menjadikan media sebagai instrumen ideologi kelompoknya.

PENUTUP

Media tidak dapat dipungkiri senantiasa menampilkan dua wajah utama yaitu netralitas sebagai cerminan kesadaran masyarakat, akan tetapi di sisi lain, merepresentasikan adanya tekanan kelompok-kelompok kepentingan dalam menaikkan suatu isu menjadi agenda media. Hal ini tampak jelas dimana kekuatan-kekuatan riil dalam masyarakat mengontrol independensi media. Pengaruh tersebut tampak dalam cara pemilik media mengambil posisi pada kekuatan-kekuatan politik yang saling bertarung dalam kontestasi pemilihan presiden, gubernur, bupati/walikota, termasuk pemilihan legislator.

Kepemilikan Stasiun televisi MetroTV oleh ketua partai pendukung pemerintah memicu keraguan informan tentang independensi media. Apalagi keberpihakan media semakin menguat setiap kali mendekati masa kontestasi politik nasional. Meskipun independensi media kerap menjadi jargon dalam idealisme media massa, tetapi kepentingan politik ekonomi media tidak terlepas dari pengaruh dominan kepentingan pemilik media. Hal ini tercermin pada produksi teks yang mewakili ideologi dominan yang berkuasa.

Pengetahuan informan akan relasi kuasa yang terjadi antara media dan pemerintah mempengaruhi penerimaan audiens terhadap pemberitaan atau teks yang diproduksi media. Ini termasuk juga penilaian informan terhadap independensi media bisa berbeda-beda tergantung pada pola konsumsi dan preferensi berita/informasi yang selalu diakses oleh audiens. Pola ini

membentuk system pengetahuan yang otonom dan mandiri. Ini menjadi kekuatan khalayak dalam bersikap terhadap hegemoni media.

Khalayak aktif mendorong proses literasi media yang menghindarkan khalayak dari berita menyesatkan (hoaks), sekaligus membantu memahami maksud tersembunyi di balik berita/informasi. Efek konstruksi media paling jelas pada orang-orang yang secara langsung dipengaruhi oleh masalah.

Pada posisi penerimaan hegemonik-dominan, informan menerima dan berbagi nilai media tentang isu radikalisme. Informan menyetujui pernyataan media yang memperlihatkan adanya radikalisme dalam masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Pertentangan bukti-bukti rendah karena beberapa peristiwa di tanah air menunjukkan keberadaan aktivitas yang dianggap radikal. Resistensi yang lebih lemah terhadap pesan-pesan media, menunjukkan posisi media yang cukup kuat dalam mempengaruhi penerimaan informan atas teks tersebut.

Pada posisi penerimaan oposisional, kesadaran politik para informan dan reaksi mereka terhadap konstruksi informasi media menyangkut masalah politik, khususnya isu radikalisme dan intoleransi di Indonesia tidak dengan mudah dipengaruhi (rentan) konstruksi informasi media. Karakteristik khalayak demikian karena memiliki pengetahuan, pengalaman, nilai, dll yang memungkinkan audiens melakukan proses seleksi dan penilaian terhadap teks media, agenda media, dan institusi media.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirsyah. 2012. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep, dan Strategi Pelaksanaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Avriyanty, Ria. (2012). Analisis Resepsi Penonton di Youtube Terhadap Konstruksi Gender Dalam Video Musik If I Were A Boy Karya Beyonce Knowles. Depok, Universitas Indonesia
- Bakti, Agus Surya. 2016. *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Daulat Press: Jakarta
- Baran, S. J., & Davis, D. K. (2012). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. USA: Wadsworth.
- Biocca, Frank. 1985. The Active Audience: Trivia, Exaggeration, or Ideology. Paper presented at the Annual Meeting of the International Communication Association (35th, Honolulu, HI, May 23-27, 1985)
- Carey, J. 1989. *A Cultural Approach to Communication*. New York, NY: Routledge
- Creswell, John W., 2009. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- David Croteau, W. H. (2003). *Media and Ideology. Media/Society: Industries, Images and Audiences*. London: Sage Publications Inc.
- De Fleur, Melvin L., and Rokeach, Sandra-Ball. 1982. *Theories of Mass Communication, Fourth Edition*. New York & London: Longman.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- During, Simon. 1993. *The Cultural Studies Reader. Encoding, Decoding*. New York : Routledge.
- Enjang Muhaemin1, Irfan Sanusi2. 2019. Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 3 Nomor 1 (2019) 17-34
- Ghazaly. 2018. Ideologi Media Massa Dalam Headline Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden (*Critical Discourse Analysis* Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden Republik Indonesia 2014 Pada Headline Surat Kabar Seputar Indonesia dan Media

- Indonesia. Disertasi.
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Griffin, E. (2006). *A First Look At Communication Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Hadi, Ido Prijana. 2007. *Khalayak Maya dalam Media Online: Studi Reception Analysis tentang Interaktivitas pada Teks Suara Surabaya.net*. Scriptura.
- Himpunan peraturan perundang-undangan. 2010. "Undang-Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Terorisme"
- Imran, Hasyim Ali. 2012. *MEDIA MASSA, KHALAYAK MEDIA, THE AUDIENCE THEORY, EFEK ISI MEDIA DAN FENOMENA DISKURSIF (Sebuah Tinjauan dengan Kasus pada Surat kabar Rakyat Merdeka) JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA Vol. 16 No. 1 (Januari – Juni 2012)*
- Jones, V. 2006. *Cognitive Processes During Problem Solving of Middle School Students with Different Levels of Mathematics Anxiety and Self-esteem: Case Studies*. Disertasi tidak diterbitkan. Tallahassee, FL: Florida State University.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi, Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Kasali, Rhenald. 2006. *Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2006), h. 21 – 23
- Lazarsfeld, Paul F., Bernard Berelson and Hazel Gaudet. 1944. *Article THE PEOPLE'S CHOICE How the voter makes up his mind in a presidential campaign*
- Littlejohn, Stephen W. Karen A. Foss. 2009. *ENCYCLOPEDIA OF COMMUNICATION THEORY*, by SAGE Publications, Inc
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta : Salemba Humanika
- Louw, P. E. (2001). *The Media and Culture Production*. London: Sage Publication.
- Mas' oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta : LP3ES
- McNair, Brian. 2015. *Pengantar Komunikasi Politik*. Nusa Media, Bandung. Terjemahan dari karya Brian McNair, *An Introduction to Political Communication* (London and New York: Routledge, 2011)
- McQuail, Dennis. (1997). *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Penerbit Rosdakarya
- Pambayun, Ellys Lestari. 2013. *One Stop Qualitative Research Methodology In Communication*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Poewardarminta W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka Nasional.
- Putra, Afdal Makkuraga, David Pardamean Simorangkir. 2020. *Ethnicity and Leadership in the Film "A Man Called Ahok" (Reception Analysis in Jakarta Society)*. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, April 2020 ISSN (2226-8235) VRI-9, IVVXe 4
- Robbins, Stephen P and Timothy A. Judge. 2015. *Organizational Behavior*. Pearson. United State America. Edisi 16.
- Sedgwick, Mark. 2007. *Inspiration and the Origins of Global Waves of Terrorism*. *Studies in Conflict & Terrorism*, Volume 30, 2007 - [Edisi 2](#) Halaman 97-112
- Slavin R.E. 2009. *Educational Psychology: Theory and Practice (9th ed.)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Soalohon, Ramdani. 2017. *Resepsi Khalayak Terhadap Pemberitaan Kasus Antasari Azhar Dalam Portal Berita Online Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro Artikel - 2017*

Sugiyono. 2007. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta

Sukma, Rizal. 2004. *Islam in Indonesian Foreign Policy : Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity*. London: Routledge.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.

Sumber daring:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/7-percobaan-pembunuhan-terhadap-bung-karno.html>, diakses Selasa 10/11/2020 18.38 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-1167203/data-ledakan-bom-di-indonesia-2000-2009> diakses Selasa 10/11/2020 pukul 18.44 wib

Tumpulnya BNPT, Melempemnya Deradikalisasi -- <https://tirto.id/tumpulnya-bnpt-melempemnya-deradikalisasi-kr> diakses Rabu, 4/11/2020 20.02

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34989-metro-tv-dan-grup-mnc-klarifikasi-keberimbangan-dan-netralitas-siaran> diakses Minggu, 4/4 2021 19.06 wib

<https://www.wartaekonomi.co.id/read171596/inilah-8-partai-yang-dukung-jokowi-dua-periode.html> diakses 4/4 2021 19.20 wib